



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 – 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2016-2021 telah disusun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang berkompeten demi penyempurnaan rencana strategis ini.

Semarang, 2017

Kepala Dinas Pendalialn Penduduk dan KB
Kota Semarang



Drs. EDDY RIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198503 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB..	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
2.2.1 Sumber Daya Pegawai :.....	12
2.2.2.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	18
2.4.2 Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB.....	22
BAB III	23
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	23
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25	
3.3 TELAHAH VISI MISI DAN PROGRAM BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	31
3.5 Penyusunan Isu Strategis	34
BAB IV.....	35
TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	35
BAB V.....	36

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI.....	38
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII	65
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	66
PENUTUP	66

DAFTAR LAMPIRAN

CASCADING RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	667
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang merupakan OPD baru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, OPD semula adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

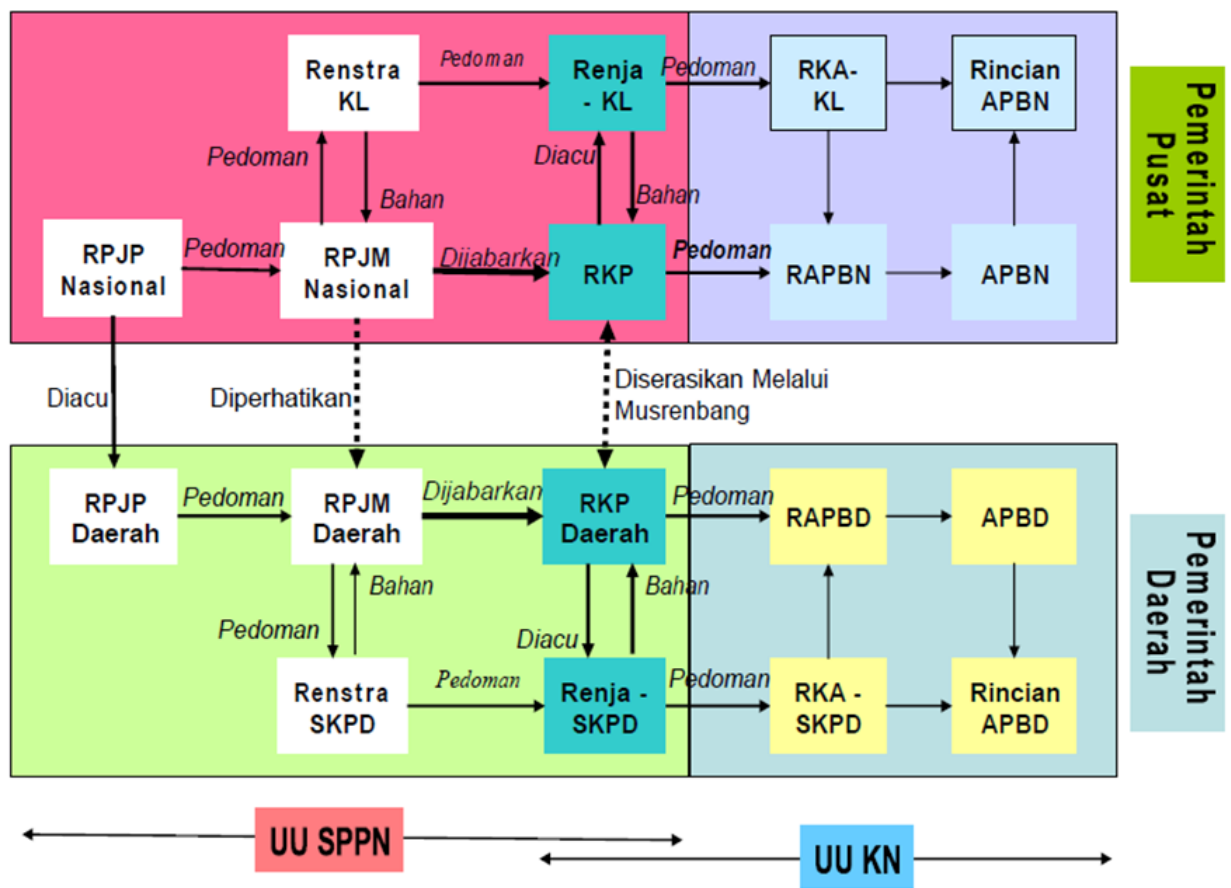
Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut "pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, keluarga berkualitas, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016 - 2021 untuk menurunkan angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Dokumen Renstra Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2016 -2021 sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional; Provinsi dan Kota. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis OPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- j. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- k. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3;

- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2021 (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) ;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- v. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dan memberikan arah (road map) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Kota Semarang untuk mencapai visi dan misi.

Sedangkan tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang yang berupa makna dan esensi dari Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG
	Pada bagian ini menguraikan secara ringkas mengenai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG
	Pada bab ini akan digambarkan indikasi permasalahan, telaah visi misi KDH terpilih serta merumuskan beberapa isu permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Pada bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran serta Strategi dan Kebijakan jangka menengah OPD
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Bab ini berisi rencana program dan kegiatan , indikator kinerja dan pendanaan indikatif dari Tahun 2016 sd 2021.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Pada bab ini memadukan sinergitas dan daya dukung program pada sasaran RPJMD
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota. Selain itu juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terkait dengan tugasnya, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

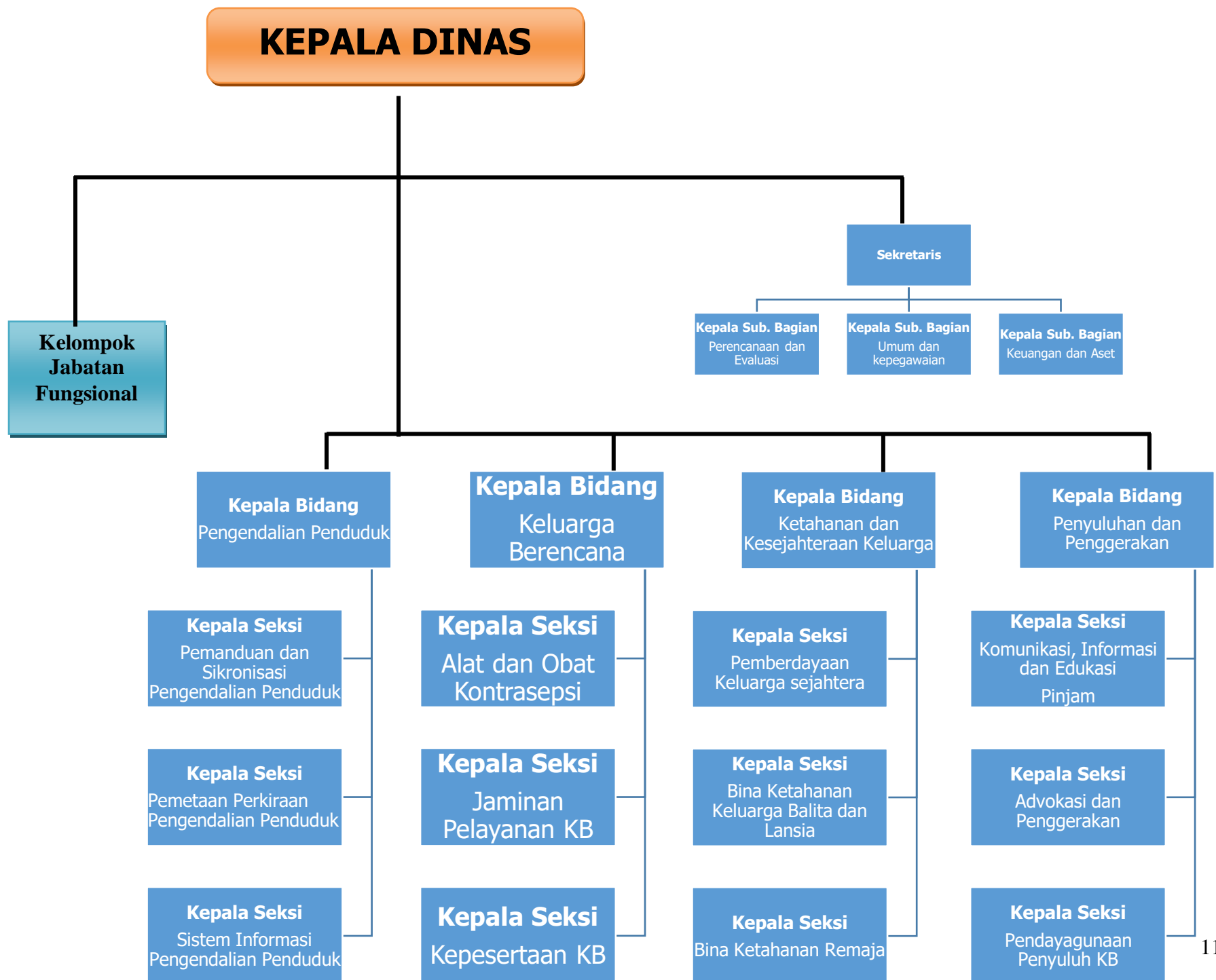
Setiap badan atau lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8, susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - sub bagian perencanaan dan evaluasi
 - sub bagian keuangan; dan
 - sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
 - Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - Seksi Alat dan Obat Kontrasepsi;

- Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia;
 - Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
- Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- g. Kelompok jabatan fungsional

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Sumber Daya Pegawai :

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 95

orang, terdiri dari 35 orang Struktural dan 57 orang Fungsional dan 3 orang non ASN

sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
(Data per Oktober 2017)

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	1	2	3	6	2		14
Pengendalian Penduduk	0	0	1	1	1	1	1	1	6
Keluarga Berencana	0	0	0	0	2	4	0	1	7
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	2	4	0	0	6
Penyuluhan dan Penggerakan	0	0	0	1	2	3	0	1	7
P L K B			1		18	17	2	14	52
Non ASN									3
JUMLAH	0	0	3	4	28	35	5	17	95

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat					2	1		2	1	5	3		14
Pengendalian Penduduk						1			1	2	1	1	6
Keluarga Berencana								1	2	4			7
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1	1			1	3			6
Penyuluhan dan Penggerakan									2	3	2		7
P L K B					7	6		1	14	24			52
Non ASN					2	1							3
JUMLAH					12	10	0	4	21	41	6	1	95

Tabel 2.3
Struktur Esselon Menurut Jenis Kelamin

ESSELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II	1		1
Esselon III	2	2	4
Esselon IV	3	12	15
JUMLAH	6	14	20

2.2.2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Perlengkapan Kantor
(Data per 31 Desember 2016)

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG			LOKASI
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	REGULATOR	1	1	-	-	
2	AMPLIFYER	1	-	-	1	
3	AC Split 1 PK	28	25	4	-	
4	AC Split 2 PK	3	3	-	-	
5	AC Split 2 1/2 PK	1	-	1	-	
6	AC Split 1 1/2 PK	8	11	-	-	
7	Almari kaca	1	-	-	1	
8	Almari besi	19	12	7	1	
9	Almari kayu	8	6	3	5	
10	Almari es	1	1	-	1	
11	Almari data	1	-	1	-	
12	Almari buku	1	-	1	-	
13	Almari arsip	4	2	3	-	
14	Almari	3	1	-	3	
15	Brangkas	1	1	-	-	
16	Computer PC	35	22	13	5	
17	Camera Digital	9	3	1	5	
18	Filling kabinet	36	3	-	-	
19	Handycam	1	-	1	1	
20	Kipas angin	24	24	4	7	
21	Kursi hadap	4	3	1	-	
22	Kursi stap	126	79	47	-	
23	Kursi panjang	3	3	-	-	
24	Kursi Eselon IV	52	27	25	-	
25	Kursi eselon III	8	8	-	-	
26	Kursi eselon II	3	3	-	-	
27	Kursi meja	-	15	-	-	
28	Kursi tamu	3	2	-	1	
29	Mobil penumpang	8	7	1	2	
30	Mobil Penerangan KB	1	-	-	-	
31	Mobil Pelayanan KB	1	-	-	-	
32	Sepeda Motor	109	16	70	23	
33	Kursi Lipat	260	200	31	29	

34	Laptop	60	40	12	8	
35	LCD	11	9	-	2	
36	Layar Proyektor	9	7	2	-	
37	Meja	142	96	46	72	
38	Mesin Ketik	10	5	-	5	
39	Papan Mana	12	10	-	2	
40	Printer	42	19	16	7	
41	Rak piring / buku	11	6	4	1	
42	Side Desk	2	2	-	-	
43	Sound System	2	2	-	-	
44	Speker + stand	1	1	-	-	
45	Sofa	7	6	1	-	
46	Werles	3	-	3	-	
47	White Bord	12	10	2	-	

Perlengkapan kantor tersebut berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Balai Penyuluhan dan Puskesmas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Semarang dapat dilihat dari capain indikator kinerja SPM dan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan OPD dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya. Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N O	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Tar get lain nya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Capaian RPJMD 2011-2015
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Pengendalian angka kelahiran (TFR)			V	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,04	2,16	2,12	2,02	2,02	2,10	98	97,2	99	103,9	103,9	100	103,9
1	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	V	-	-	0,5	0,5	0,5	0,54	0,5	0,5	0,52	0,6	0,56	0,56	0,56	0,48	96,2	83,3	89,2	89,3	89,3	119	89,3
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	V	V	-	76,50	76,60	76,50	77,02	76,50	76,50	76,02	77,0	76,4	76,6	76,20	76,88	99,2	100	99,8	99,4	99,6	100	99,6
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	V	-	-	12	12	12	12	12	11,50	13,45	12,33	12,32	11,09	11,73	11,30	89,2	97,3	97,4	108	102	101	102
4	Cakupan anggota BKB ber-KB	V	-	-	70	70	70	22	65	65	70	73	79,96	22,69	60	65	100	104	114	100	92	100	92
5	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	V	-	-	80	80	85	87	87	87	85,59	80	83,83	87	87,5	77,33	106	100	98,6	100	100	88,9	100
6	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	V	V	-	1:2	1:2	1:3	1:3	1:2	1:2	1:4	1:4	1:4	1:4	1:3	1:3	96,8	96,8	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. 000.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. 000.000)						Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1.603	2.036	3.425	1.833	1.492	3.647	1.586	1.436	3.369	1.832	1.479	3.458	98.97	70.53	98.37	99.95	99,14	94,82		

Berdasarkan tabel kinerja diatas terdapat indicator kinerja yang belum tercapai, diantaranya Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 Tahun, Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif, Cakupan anggota BKB ber-KB, Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB. Dengan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh semakin menurunnya jumlah petugas Lapangan KB dan kurangnya berhasilnya program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program KB di masyarakat.

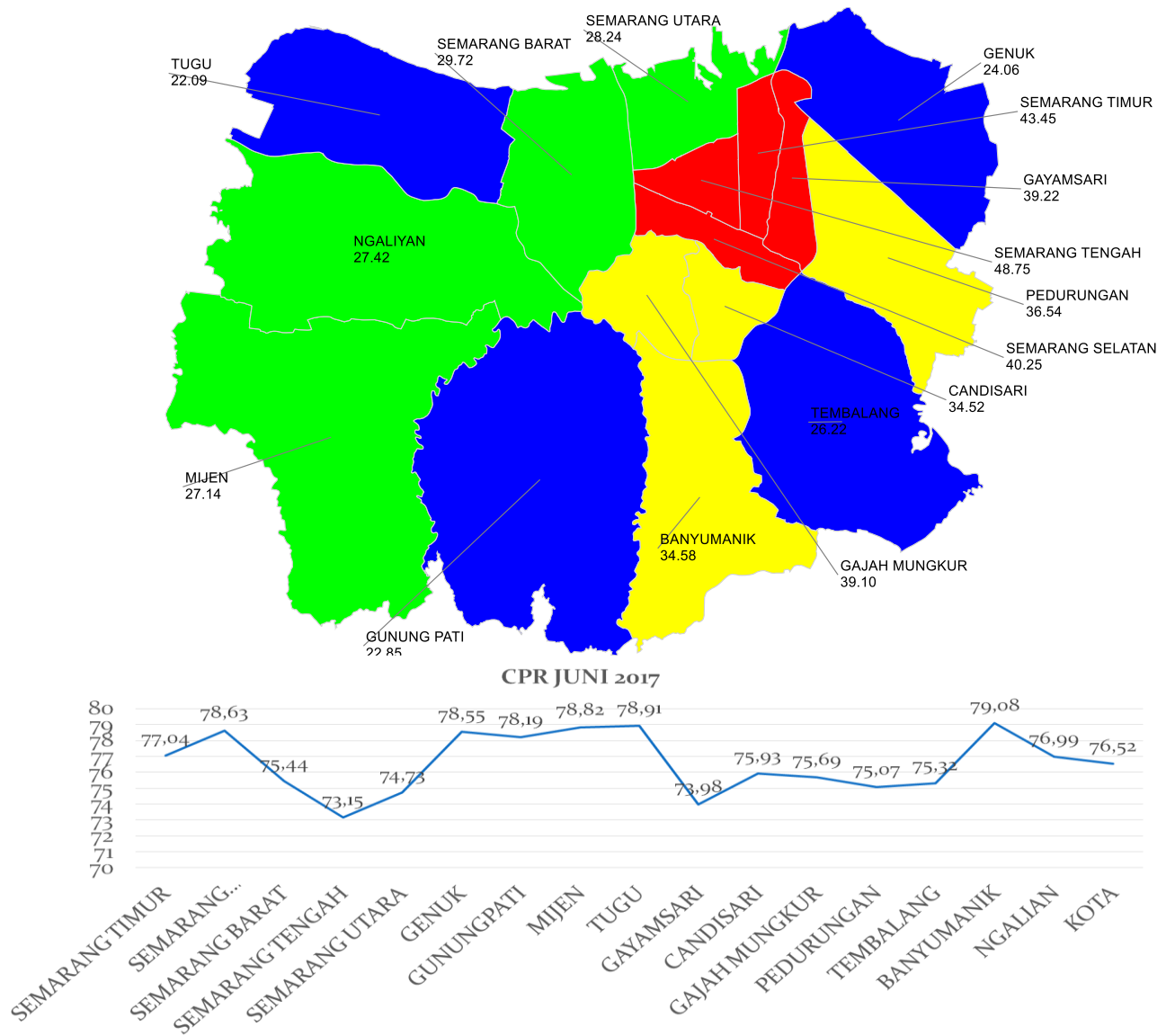
Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2010 – 2015 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen.

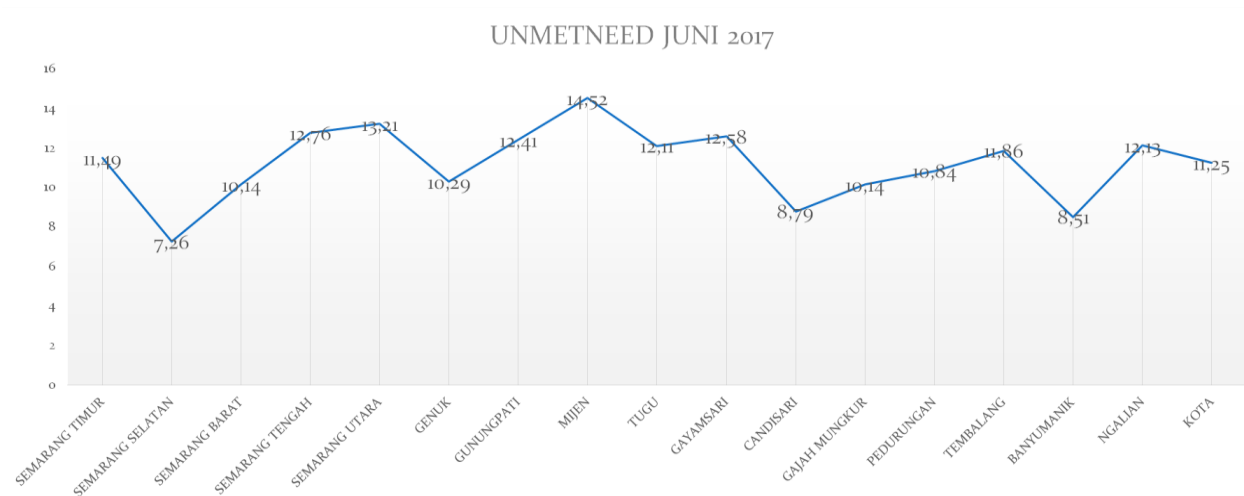
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.1 Tantangan dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

- a. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB masih kurang.
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata sehingga mengakibatkan :
 - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
 - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi
 - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need)
 - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
 - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun
 - rendahnya kesertaan KB Pria

UNMETNEED KOTA SEMARANG

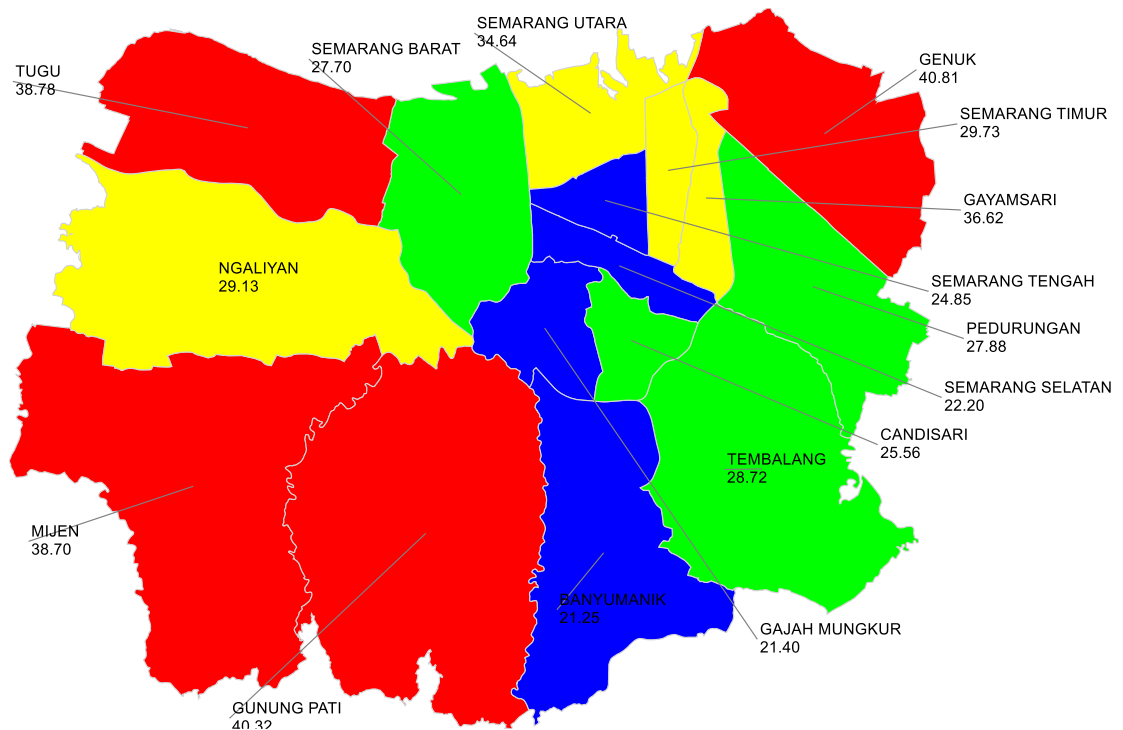




c. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi

- terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja
- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
- Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal

UKP < 21 TAHUN KOTA SEMARANG (4Kec-Terbanyak)



- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal, antara lain Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)

2.4.2 Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB

Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

- a. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga legislatif terhadap Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. Peran Mitra kerja terhadap program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) semakin dapat andalkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tabel

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Menurunnya jumlah peserta KB Aktif	Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif	<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan- Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB	Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB belum optimal
<ul style="list-style-type: none">-Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi-Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi-Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus	Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB belum merata.	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya jumlah Penyuluh KB- Terbatasnya jumlah pegawai

meningkat, sementara, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun - Rendahnya kesertaan KB Pria			
- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah -- Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal	Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi	Masih banyaknya perkawinan usia muda,	Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) belum optimal
Masyarakat belum paham arti pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS dalam pelestarian peserta KB Aktif	Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB	Terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan	Terbatasnya SDM tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

ditetapkan Visi dan Misi, sebagai berikut : **"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"**

Visi tersebut bermakna bahwa:

Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

Dari definisi **HEBAT** dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"** di atas dijabarkan dalam 4 (empat) misi berikut:

1. **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.**
2. **Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.**
3. **Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.**
4. **Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke 1 yaitu : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas** dan tujuan ke 1 yaitu : **Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya** melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan serta dengan adanya masyarakat yang menjunjung kearifan budaya lokal di Kota Semarang.

Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kota Semarang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”				
No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke - 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas			
	Arah Kebijakan : Peningkatan Promosi, Kesehatan masyarakat dan Lingkungan	Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB belum optimal	Minat aparatur untuk pengembangan inoasi KIE relatif rendah	Komitmen dinas untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian Aparatur
		- Terbatasnya jumlah Penyuluh KB - Terbatasnya jumlah pegawai	Belum terpadunya pelaksanaan program/kegiatan, masih bersifat parsial	Besarnya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Semarang terkait Pengendalian
		Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) belum optimal	Kurangnya partisipasi, pemahaman dan kesadaran organisasi kemasyarakatan	Penduduk dan KB yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		Terbatasnya SDM tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga	Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal	Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, serta stakeholders dalam Pengendalian Penduduk dan KB cukup tinggi

3.3TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” sebagai berikut :

1. **Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;**
2. Pembangunan Pendidikan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat;
4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas dengan memberikan perhatian khusus pada

peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

I. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

TELAAH RENSTRA BKKBN
VISI, MISI KABINET KERJA DAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS BKKBN

II. Visi dan Misi Kabinet Kerja

Visi dan BKKBN tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014 - 2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 sebagai berikut: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG** Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
6. wujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" sebagai berikut :

1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. Pembangunan Pendidikan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat;
4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama "Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat".

1. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk "mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas".

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DO).

Tabel 3.3
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan BKKBN Perwakilan Jawa Tengah dan BKKBN Pusat

visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong				
No	Misi dan Tujuan BKKBN Perwakilan Jawa Tengah dan BKKBN Pusat	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing			
	Tujuan : “Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”	Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB belum optimal	Minat aparatur untuk pengembangan inoasi KIE relatif rendah	Komitmen dinas untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian Aparatur
		- Terbatasnya jumlah Penyuluh KB - Terbatasnya jumlah pegawai	Belum terpadunya pelaksanaan program/kegiatan, masih bersifat parsial	Besarnya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Semarang terkait Pengendalian
		Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) belum optimal	Kurangnya partisipasi, pemahaman dan kesadaran organisasi kemasyarakatan	Penduduk dan KB yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		Terbatasnya SDM tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga	Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal	Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, serta stakeholders dalam Pengendalian Penduduk dan KB cukup tinggi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Dalam konteks kependudukan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir terhitung sejak 2011 – 2016, perkembangan penduduk di Kota Semarang cenderung dinamis. Sejak 2011 – 2016, jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk Kota Semarang mengalami penurunan rata-rata pertahun mencapai 0,82% setiap tahunnya.

Berdasarkan sebaran atau distribusi penduduknya, kecamatan di Kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2011 – 2016) adalah Kecamatan Pedurungan. Adapun kecamatan lain yang memiliki penduduk relatif lebih tinggi (>100.000 jiwa) dibandingkan kecamatan lainnya adalah Kecamatan Semarang Barat, Tembalang, Banyumanik, Semarang Utara dan Ngaliyan.

Sebaran Penduduk Per Kecamatan Kota Semarang Tahun 2011 – 2016

No.	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kec. Mijen	54.875	56.570	57.887	59.425	61.405	57.678
2.	Kec. Gunungpati	73.459	75.027	75.885	77.333	78.641	76.600
3.	Kec. Banyumanik	127.287	128.225	130.494	131.404	132.508	132.360
4.	Kec. Gajahmungkur	63.182	63.430	63.599	63.660	63.707	65.340
5.	Kec. Smg Selatan	83.133	82.931	82.293	79.952	79.620	85.897
6.	Kec. Candisari	79.950	79.902	79.706	79.646	79.258	82.557
7.	Kec. Tembalang	138.362	142.941	147.564	154.697	156.868	146.124
8.	Kec. Pedurungan	174.133	175.770	177.143	178.544	180.282	180.613
9.	Kec. Genuk	88.967	91.527	93.439	95.218	97.545	93.392
10.	Kec. Gayamsari	73.052	73.584	73.745	73.850	74.178	76.024
11.	Kec. Smg Timur	79.615	78.889	78.622	78.019	77.331	81.898
12.	Kec. Smg Utara	127.417	127.921	128.026	128.134	127.752	131.926
13.	Kec. Smg Tengah	72.525	71.674	71.200	70.727	70.259	74.391
14.	Kec. Smg Barat	160.112	158.981	158.668	158.510	158.131	164.623
15.	Kec. Tugu	29.807	30.904	31.279	31.592	31.954	31.255
16.	Kec. Ngaliyan	118.482	120.922	122.555	124.195	125.828	123.741
Jumlah		1.544.358	1.559.198	1.572.105	1.584.906	1.595.267	1.604.419

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016

Meskipun relatif memiliki luasan lahan yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain yang berada di pinggiran, kecamatan – kecamatan yang termasuk kedalam area pusat kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain di wilayah pinggiran. Sebagian penduduk yang memilih bermukim di area pusat kota umumnya lebih mengutamakan kemudahan akses terhadap aktivitas perdagangan dan jasa yang sebagian besar terpusat di pusat Kota Semarang.

Pada umumnya, pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan. Secara keseluruhan, dalam kurun enam tahun terakhir (2010 – 2015) kedatangan dan perpindahan penduduk Kota Semarang dinilai cukup signifikan dibandingkan kelahiran dan kematian.

Jumlah penduduk yang datang relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang lahir, mati maupun pindah. Kondisi yang demikian disebabkan salah satunya oleh daya tarik Kota Semarang sebagai pusat aktivitas khususnya perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Sebagian besar penduduk yang datang ke Kota Semarang memiliki kecenderungan menetap di wilayah pinggiran.

3.5 Penyusunan Isu Strategis

Isu Strategis dan sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB

No.	ISU STRATEGIS	SASARAN
1	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti dengan perilaku untuk menjadi akseptor KB
2	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	1. Menurunnya TFR dan unmet-need, serta meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR 2. Menurunnya kesenjangan TFR, CPR, unmet need antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi 3. Meningkatnya peserta Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4. Meningkatnya kesertaan KB Pria
3	Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan	1. Meningkatnya pemahaman yang komprehensif pada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 2. Menurunnya kelahiran pada perempuan usia remaja (15-19 tahun) 3. Meningkatnya median usia kawin pertama
4	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Semarang selama kurun waktu 2016 – 2021, Pada Misi 1 RPJMD adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.

Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran dalam peningkatan pemahaman dan tentang kesehatan reproduksi, serta pembagunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Indikator Kinerja Sasaran : Angka harapan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Semarang, Tujuan / Sasaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET					KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	Tujuan : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	%	2,02	2,1	2,02	2,01	2,00	2	2	2
	Sasaran: Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS (15 - 49 th)	%	2,02	2,1	2,02	2,01	2,00	2	2	2

Catatan : selaras dan mendukung pada Rancangan Perubahan RPJMD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dijabarkan dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dengan berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya (melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera).

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Berikut disajikan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Semarang, mengacu pada Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan dengan Strategi Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta Arah Kebijakan Peningkatan Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	1.Penguatan dan pepaduan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	1. Meningkatkan Akses dan pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas
			2. Meningkatkan Advokasi dan KIE program KKBPK

		2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)	Meningkatkan Pembangunan Keluarga
		3. Pemaduan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk	Mengendalikan Kuantitas Penduduk
		4. Meningkatkan kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan :

1. Program Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alokon bagi keluarga Miskin, pembinaan KB serta pemenuhan sarana prasarana KB.

Kegiatan pada program Keluarga Berencana :

- a. Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- b. Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- c. Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON);
- e. Jaminan Pelayanan KB;
- f. Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- g. Fasilitasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- h. Penyediaan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- i. Penyediaan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- j. Penyediaan analisis dampak kependudukan.

2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, peningkatan informasi dan edukasi tentang KB.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- c. Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja;
- d. Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD;
- e. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB

3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga.

Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga;
- b. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- c. Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS);
- d. Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah;
- e. Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja

4. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan wawasan tentang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan.

Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Pengembangan sistem informasi dan data pengendalian penduduk;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- c. Penyediaan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- d. Penyediaan analisis dampak kependudukan;
- e. Pemaduan dan sinkronisasi pengendalian penduduk.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- j. Penyediaan makan minum;
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- m. Belanja jasa penunjang adm perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- c. Pengadaan Mebeluer;
- d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
- e. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
- f. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

- a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu;
- b. Penyusunan LKPJ OPD;
- c. Penyusunan LkjIP;
- d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- f. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- g. Penyusunan Renstra OPD;
- h. Penyusunan Renja OPD;
- i. Penyusunan RKA Dan DPA Perubahan;
- j. Penyusunan RKA Dan DPA.

Program dan Kegiatan Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
				Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
Tujuan 1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total									
Sasaran 1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)									
1.2.08.15		PROGRAM KELUARGA BERENCANA		2.756.766.700	4.281.506.000	3.916.638.250	2.133.361.000	2.518.262.000	2.600.046.000
				2.756.766.700	4.281.506.000	3.916.638.250	2.133.361.000	2.518.262.000	2.600.046.000
1.2.08.15	001	PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	Rp.	244.360.000	638.249.000	0	0	0	0
		Jumlah pelayanan KB Lini lapangan (16.00 kegiatan)	kegiatan	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah kegiatan penyediaan obat dan alat kontrasepsi untuk pelayanan KB Moyan dan momentum (4.00 kegiatan)	kegiatan	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.15	005	PEBINAAN KELUARGA BERENCANA	Rp.	338.100.000	309.700.000	0	0	0	0
		Jumlah data dasar Program KKBPK (12.00 dokumen)	dokumen	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Jumlah data keluarga (1.00 dokumen)	dokumen	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
1.2.08.15	017	Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	1.889.430.000	1.044.000.000	1.266.000.000	550.000.000	765.000.000	585.000.000
		Jumlah Sarana prasarana pelayanan KB yang disediakan (450.00 unit)	unit	100.00	230.00	300.00	350.00	400.00	450.00
		Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB/gudang obat (17.00 unit)	unit	10.00	14.00	17.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.15	018	Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	77.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0
		Jasa Konsultan Perencanaan (7.00 paket)	paket	2.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.15	019	FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD	Rp.	207.876.700	741.107.000	0	0	0	0
		Jambore PPKBD/SKD (1.00 kegiatan)	kegiatan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Temu Kerja PPKBD/SKD (4.00 kegiatan)	kegiatan	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.15	020	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB	Rp.	0	678.750.000	0	0	0	0
		Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola (18.00 unit)	unit	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
1.2.08.15	021	Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp.	0	769.700.000	1.044.000.000	580.800.000	790.500.000	715.046.000
		Dukungan Operasional sarana prasarana penyuluhan KKBPK (128.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	12.00	32.00	64.00	96.00	128.00
		Dukungan Operasional penyuluhan KKBPK (128.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	12.00	32.00	64.00	96.00	128.00
		Dukungan operasional wilayah kampung KB (128.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	12.00	32.00	64.00	96.00	128.00
1.2.08.15	022	Pengelolaan Alat dan Kontrasepsi (ALOKON)	Rp.	0	0	150.000.000	200.000.000	135.000.000	250.000.000
		Jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi (20.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	8.00	12.00	16.00	20.00
		Jumlah kegiatan pendistribusian Alokon pada pelayanan KB (160.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	64.00	96.00	128.00	160.00
1.2.08.15	023	Jaminan Pelayanan KB	Rp.	0	0	850.000.000	350.000.000	262.762.000	300.000.000
		Jumlah Rumah Konseling Kespro (16.00 unit)	unit	0.00	0.00	4.00	8.00	12.00	16.00
		Jumlah Provider pelayanan KB yang dilatih (120.00 orang)	orang	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00	120.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		Jumlah pelayanan KB Perusahaan (10.00 perusahaan)	perusahaan	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00	10.00
1.2.08.15	024	Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	Rp.	0	0	506.638.250	320.000.000	380.000.000	550.000.000
		Roadshow TPKBPK melalui pelayanan KB statis dan moyan (72.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	48.00	56.00	64.00	72.00
		Gerakan terpadu program KB bersama mitra kerja (25.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	9.00	14.00	20.00	25.00
1.2.08.15	028	Peningkatan Kapasitas Pembina KKBPK	Rp.	0	0	0	132.561.000	185.000.000	200.000.000
		Tertib dokumen administrasi pembina KKBPK (9.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00
		Meningkatnya motivasi dan kinerja pembina KKBPK (6.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00
1.2.08.16		PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI		206.757.000	236.756.000	1.482.800.000	206.454.000	275.435.000	315.157.000
				206.757.000	236.756.000	1.482.800.000	206.454.000	275.435.000	315.157.000
1.2.08.16	001	FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB	Rp.	206.757.000	236.756.000	0	0	0	0

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		Penguatan Program KKBPK Lini Lapangan (6.00 kegiatan)	kegiatan	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.16	002	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Rp.	0	0	340.000.000	30.000.000	70.000.000	99.459.000
		Jumlah kegiatan penyebaran informasi KKBPK (22.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	7.00	12.00	17.00	22.00
		Jumlah kegiatan KIE melalui media (20.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	10.00	15.00	18.00	20.00
1.2.08.16	003	Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja	Rp.	0	0	267.800.000	25.000.000	75.000.000	72.500.000
		Jumlah kegiatan Harganas (4.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		JUmlah pegiatan penguatan program KKBPK bagi mitra kerja (20.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	6.00	10.00	14.00	18.00	20.00
1.2.08.16	004	FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD	Rp.	0	0	295.000.000	80.000.000	30.435.000	65.198.000
		Jumlah kegiatan pembinaan Forkom PPKBD/SKD (20.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	6.00	12.00	16.00	20.00
		Jumlah kegiatan temu kerja PPKBD/SKD (8.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		Jumlah kegiatan jambore PPKBD/SKD (4.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
1.2.08.16	005	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB	Rp.	0	0	580.000.000	71.454.000	100.000.000	78.000.000
		Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola (78.00 buah)	buah	0.00	0.00	34.00	50.00	66.00	78.00
1.2.08.18		PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR		273.760.000	518.760.000	0	0	0	0
				273.760.000	518.760.000	0	0	0	0
1.2.08.18	002	FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	Rp.	273.760.000	518.760.000	0	0	0	0
		Jumlah konselor,yg mengikuti pelatihan Orientasi KRR (140.00 orang)	orang	30.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.19		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA		220.860.000	740.000.000	873.561.750	189.250.000	236.087.000	987.119.000
				220.860.000	740.000.000	873.561.750	189.250.000	236.087.000	987.119.000

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
1.2.08.19	002	FASILITASI DAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA	Rp.	220.860.000	740.000.000	220.561.750	64.250.000	50.000.000	107.119.000
		Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan tentang BKB dan BKL (96.00 kelompok)	kelompok	30.00	32.00	48.00	64.00	80.00	96.00
		Jumlah Kader BKB dan BKL yang dilatih (390.00 orang)	orang	96.00	96.00	190.00	270.00	330.00	390.00
1.2.08.19	003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp.	0	0	133.000.000	30.000.000	46.087.000	340.000.000
		Jumlah pengelola UPPKS yg dilatih manajemen (300.00 orang)	orang	0.00	0.00	64.00	144.00	200.00	300.00
		Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga (8.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
1.2.08.19	004	Peningkatan Kewirausahaan dan Ketrampilan (UPPKS)	Rp.	0	0	105.000.000	40.000.000	45.000.000	410.000.000

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		Jumlah kader UPPKS yang dilatih ketrampilan dan manajemen wirausaha (1000.00 orang)	orang	0.00	0.00	220.00	460.00	720.00	1000.00
1.2.08.19	005	FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	Rp.	0	0	275.000.000	25.000.000	70.000.000	90.000.000
		Jumlah petugas konselor yang dilatih dan mengikuti seminar (430.00 orang)	orang	0.00	0.00	150.00	250.00	350.00	430.00
		Jumlah peserta Orientasi KRR dan Program Gen Re (500.00 orang)	Orang	0.00	0.00	150.00	300.00	400.00	500.00
1.2.08.19	006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat, PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	Rp.	0	0	140.000.000	30.000.000	25.000.000	40.000.000
		Jumlah BKR yang dibina (80.00 kelompok)	kelompok	0.00	0.00	32.00	48.00	64.00	80.00
		Jumlah kader BKR yang dilatih (250.00 orang)	orang	0.00	0.00	64.00	128.00	190.00	250.00
1.2.08.20		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	715.000.000	258.068.000	314.783.000	334.854.000
				0	0	715.000.000	258.068.000	314.783.000	334.854.000

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
1.2.08.20	001	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN DATA PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	0	0	217.200.000	96.243.000	111.050.000	104.107.000
		Jumlah dokumen data keluarga (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00
		Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK (48.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	12.00	24.00	36.00	48.00
1.2.08.20	002	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Rp.	0	0	108.700.000	71.875.000	102.788.000	118.908.000
		Profil parameter kependudukan dan KB (8.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00
		Peta perkiraan pengendalian penduduk (8.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		Rumusan analisa dampak kependudukan (4.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00
1.2.08.20	003	Penyediaan Parameter Kependudukan dan KB	Rp.	0	0	125.800.000	0	0	0
		Profil parameter kependudukan dan KB (2.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.20	004	Penyediaan Analisa Dampak Kependudukan	Rp.	0	0	100.500.000	0	0	0

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		hasil analisis dampak kependudukan (2.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.2.08.20	005	PEMADUAN DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	0	0	162.800.000	89.950.000	100.945.000	111.839.000
		- Sekolah siaga kependudukan (16.00 buah)	buah	0.00	0.00	2.00	6.00	11.00	16.00
		Hasil kajian kebijakan kependudukan (4.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
00.0.00.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		0	925.021.000	1.537.580.000	2.058.487.000	2.715.508.000	3.125.815.000
				0	855.021.000	1.537.580.000	2.058.487.000	2.715.508.000	3.125.815.000
00.0.00.01	002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp.	0	69.000.000	162.000.000	240.487.000	250.000.000	300.000.000
		jumlah rekening telepon, air dan listrik kantor (3.00 rekening)	rekening	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
00.0.00.01	003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp.	0	17.500.000	0	0	0	0
		jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (16.00 unit)	unit	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.01	007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Rp.	0	13.985.000	180.000.000	190.000.000	199.008.000	250.000.000
		jumlah pegawai non asn yang terbiayai (20.00 orang)	orang	0.00	3.00	12.00	15.00	18.00	20.00
00.0.00.01	008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Rp.	0	16.534.000	42.195.000	44.000.000	45.000.000	48.000.000
		jumlah alat kebersihan kantor tersedia (115.00 buah)	buah	0.00	19.00	44.00	70.00	100.00	115.00
00.0.00.01	010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Rp.	0	24.065.000	50.000.000	52.000.000	53.000.000	58.000.000
		jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (55.00 item)	item	0.00	30.00	50.00	52.00	54.00	55.00
00.0.00.01	011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	Rp.	0	14.617.000	30.000.000	82.000.000	194.000.000	200.000.000
		jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan (8.00 jenis)	jenis	0.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00
00.0.00.01	012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp.	0	1.085.000	5.030.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000
		jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan pada tahun berkenaan (12.00 item)	item	0.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.01	013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp.	0	1.235.000	4.934.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan (5.00 jenis)	jenis	0.00	2.00	5.00	5.00	7.00	5.00
00.0.00.01	015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp.	0	1.800.000	4.400.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (5.00 jenis)	jenis	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
00.0.00.01	017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp.	0	27.150.000	74.600.000	98.000.000	100.000.000	196.815.000
		jumlah rapat dan jamuan tamu pada tahun berkenaan (36.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
00.0.00.01	018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	Rp.	0	630.000.000	509.421.000	700.000.000	980.000.000	1.000.000.000

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (20.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00
00.0.00.01	028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	Rp.	0	0	435.000.000	600.000.000	575.000.000	650.000.000
		jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan (40.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
00.0.00.01	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp.	0	38.050.000	40.000.000	35.000.000	300.000.000	400.000.000
		jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan (12.00 kegiatan)	kegiatan	0.00	5.00	8.00	12.00	12.00	12.00
00.0.00.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		0	773.647.000	1.120.599.000	2.684.813.000	3.541.744.000	4.076.888.000
				0	773.647.000	1.120.599.000	2.684.813.000	3.541.744.000	4.076.888.000
00.0.00.02	005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	0	0	0	625.000.000	930.000.000	1.140.000.000
		jumlah kendaraan dinas yang disediakan (22.00 unit)	unit	0.00	0.00	0.00	7.00	16.00	22.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.02	007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Rp.	0	317.350.000	183.350.000	250.000.000	250.000.000	179.888.000
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (100.00 unit)	unit	0.00	15.00	35.00	50.00	80.00	100.00
00.0.00.02	010	PENGADAAN MEBELUER	Rp.	0	0	44.350.000	105.000.000	130.000.000	435.000.000
		jumlah mebeluer yang disediakan (80.00 buah)	buah	0.00	18.00	43.00	60.00	70.00	80.00
00.0.00.02	022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Rp.	0	63.625.000	300.000.000	609.813.000	990.000.000	990.000.000
		jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki pada tahun berkenaan (4.00 jenis)	jenis	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
00.0.00.02	024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	0	370.610.000	518.849.000	913.000.000	920.000.000	1.000.000.000
		jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara (110.00 unit)	unit	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
00.0.00.02	026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Rp.	0	0	26.000.000	127.000.000	228.000.000	232.000.000

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (100.00 unit)	unit	0.00	15.00	35.00	50.00	80.00	100.00
00.0.00.02	010	PENGADAAN MEBELUER	Rp.	0	0	44.350.000	105.000.000	130.000.000	435.000.000
		jumlah mebeluer yang disediakan (80.00 buah)	buah	0.00	18.00	43.00	60.00	70.00	80.00
00.0.00.02	022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	Rp.	0	63.625.000	300.000.000	609.813.000	990.000.000	990.000.000
		jumlah komponen gedung kantor yang diperbaiki pada tahun berkenaan (4.00 jenis)	jenis	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
00.0.00.02	024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Rp.	0	370.610.000	518.849.000	913.000.000	920.000.000	1.000.000.000
		jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara (110.00 unit)	unit	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
00.0.00.02	026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	Rp.	0	0	26.000.000	127.000.000	228.000.000	232.000.000
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki pada tahun berkenaan (15.00 unit)	unit	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.02	095	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)	Rp.	0	22.062.000	48.050.000	55.000.000	93.744.000	100.000.000
		jumlah perpanjangan stnk pada tahun berkenaan (129.00 unit)	unit	0.00	112.00	114.00	119.00	124.00	129.00
00.0.00.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		0	295.262.000	226.759.000	235.593.000	310.801.000	357.787.000
				0	295.262.000	226.759.000	235.593.000	310.801.000	357.000.000
00.0.00.06	005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	Rp.	0	107.366.000	190.690.000	199.524.000	221.801.000	250.000.000
		jumlah penunjang kinerja PA, PPK dan pembantu yang diberikan pada tahun berkenaan (12.00 bulan)	bulan	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
00.0.00.06	006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	Rp.	0	26.290.000	6.200.000	6.200.000	13.000.000	13.000.000
		dokumen LKPJ (5.00 DOKUMEN)	DOKUMEN	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
00.0.00.06	018	PENYUSUNAN LKJIP	Rp.	0	26.290.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
		dokumen LKJIP (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.06	020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Rp.	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
		laporan keuangan akhir tahun (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
00.0.00.06	022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	Rp.	0	19.000.000	3.164.000	3.164.000	10.000.000	10.000.000
		laporan keuangan semesteran (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
00.0.00.06	023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	Rp.	0	10.000.000	3.164.000	3.164.000	10.000.000	10.000.000
		laporan prognosis realisasi anggaran (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
00.0.00.06	028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	Rp.	0	39.830.000	5.224.000	5.224.000	10.000.000	10.000.000
		dokumen renja PD (5.00 dokumen)	dokumen	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
00.0.00.06	029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	Rp.	0	0	0	0	0	18.000.000
		dokumen renstra PD (1.00 dokumen)	dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
00.0.00.06	033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Rp.	0	23.243.000	3.074.000	3.074.000	13.000.000	13.000.000
		dokumen RKA dan DPA perubahan (10.00 dokumen)	dokumen	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

		TUJUAN / SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN / Output Kegiatan	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.06	034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	Rp.	0	23.243.000	5.243.000	5.243.000	13.000.000	13.000.000
		dokumen RKA dan DPA (10.00 dokumen)	dokumen	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Sedangkan Format Indikator Kinerja per eselon sebagaimana format yang digunakan oleh Bagian Otonomi Daerah, Sebagai bahan sinkronisasi dapat dilihat pada Tabel 6.2 indikator per eselon sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PER ESELON (Eselon III dan IV)
MENGACU PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KOTA SEMARANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	NAMA JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA JABATAN ESELON IV	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate / TFR)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS (15 - 49 th)	Sekretaris	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah rekening telepon, diar dan listrik kantor
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai Non ASN yang terbiayai
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor tersedia

					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang disediakan pada tahun berkenaan
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan pada tahun berkenaan
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
					Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah rapat dan jamuan tamu
					Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
					Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang dilakukan

[illegible]

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan penyusunan pelaporan tepat waktu dan regulatif.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, BP, BPP pada tahun berkenaan
			Penyusunan Lkjp Skpd	Dokumen LKPJ
			Penyusunan LKJIP	Dokumen LKJIP
			Penyusunan Renja PD	Dokumen Renja PD
			Renstra PD 2021-2025	Dokumen Renstra PD
			Penyusunan Rka Dan Dpa Perubahan	Dokumen RKA dan DPA Perubahan
			Penyusunan Rka Dan Dpa SKPD	Dokumen RKA, DPA
		Kasubag Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokeman Pelaporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran
Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Unmeet need	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Gedung yg dibangun
				Jumlah Sarana Prasarana pelayanan KB
			Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Operasional Penyuluhan KKBPK
				Operasional sarana prasarana Penyuluhan KKBPK
				Dukungan Operasional

					wilayah kampung KB
				Peningkatan Kapasitas Pembina KKBPk	Tertib dokumen administrasi pembina KKBPk
					Meningkatnya motivasi dan kinerja pembina KKBPk
Kabid Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Unmeet need		Pengelolaan alat dan Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah kegiatan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
					Jumlah kegiatan pendistribusian Alokon pada pelayanan KB
		Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO)	Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jaminan Pelayanan KB	Jumlah Rumah Konseling KESPRO
					Jumlah Provider pelayanan KB yang dilatih
					Jumlah Pelayanan KB perusahaan
			Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB bagi keluarga miskin	Road show TPKBK melalui kegiatan pelayanan KB Statis dan Muyan
					Gerakan Terpadu Pogram KB bersama mitra kerja
Kabid Penyuluhan dan Penggerakan	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri	Cakupan peserta KB Aktif	Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah kegiatan penyebaran informasi KKBPk
					Jumlah kegiatan KIE melalui media

						Seksi Advokasi dan Penggerakan	Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja	Jumlah kegiatan Harganas				
								Jumlah kegiatan penguatan Program KKBPK bagi Mitra kerja				
								Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana	Fasilitasi Kegiatan PPKBD/SKD	Jumlah kegiatan Pembinaan forkom PPKBD/SKD		
										Jumlah kegiatan Jambore PPKBD/SKD		
							Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Jumlah kegiatan temu kerja PPKBD/SKD				
								Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola				
						Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Progam Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan peningkatan anggota Bina Keluarga Aktif	Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlahkelompok yang diberikan pembinaan tentang BKB, BKL	
											Jumlah Kader BKB, BKL yang dilatih	
									Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Pengelola UPPKS yang dilatih manajemen	
											Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	

						Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan (UPPKS)	Jumlah kader UPPKS yang dilatih manajemen wirausaha
					Seksi Bina Ketahanan Remaja	Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah petugas Konselor mengikuti Pelatihan dan seminar
							Jumlah peserta Orientasi KRR dan Program GenRe
						Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja	Jumlah Bina keluarga Remaja (BKR) yang dibina
							Jumlah Kader BKR yang dilatih
					Seksi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk	Pengembangan Sistem Informasi dan Data Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen data keluarga
							Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK
					Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Capaian hasil program KKBPK
							Peta perkiraan pengendalian penduduk
						Penyediaan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana	Profil parameter kependudukan dan KB
Kabid Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri <20 th			Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Penyediaan analisis dampak kependudukan	Rumusan Analisis Dampak Kependudukan
						Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk	Jumlah sekolah Siaga Kependudukan
							Hasil Kajian kebijakan kependudukan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode P-RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode P-RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	1,16	2,02	2,01	2	2	2	2
2	Rasio akseptor KB per 100 PUS	76,88	76,30	76,64	76,98	77,32	78	78
3	Cakupan PUS unmet need	10,44	10,4	9,88	8,44	7,72	7	7
4	Cakupan PUS yang istrinya < 20 th	0,48	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5

BAB VIII

PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan sendiri, maupun dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 – 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kota Semarang.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA SEMARANG



Drs. EDDY RIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198503 1 013